

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Politik luar negeri suatu negara dalam pelaksanaannya diabdikan bagi kepentingan nasionalnya. Dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan politik luar negeri suatu negara maka perlu dilakukan penetapan instrumen bagi pembandingan yang akurat. Hal tersebut bisa dipahami dari penjabaran unsur-unsur utama yang tercakup dalam suatu kebijakan politik luar negeri. Jika dilihat dari unsur-unsurnya maka politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua unsur fundamental, antara lain tujuan-tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki untuk mencapainya.

Tujuan-tujuan nasional yang dicita-citakan suatu bangsa bisa terangkum dari susunan-susunan kepentingan nasional yang terumuskan secara sistematis yang dilakukan oleh elit suatu negara. Sedangkan yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional tersebut adalah tercermin dari taktik atau strategi diplomasi. Diplomasi menyediakan sarana dan pelaksana politik luar negeri. Jadi tujuan nasional adalah isi (*substance*) sedangkan diplomasi adalah cara. Dengan menggabungkan kedua unsur tersebut sehingga dapat dilihat tingkat efektifitas pelaksanaan politik luar negeri.

Dengan merujuk pada dua unsur tersebut maka dapat dianalisis, sejauh mana keberhasilan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan dari era Presiden

.....

permasalahan internal maupun eksternal yang menjadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri.

Berbagai permasalahan domestik maupun internasional yang terjadi dan berkembang, tak luput menyeret Indonesia untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalkan permasalahan domestik yang dihadapi oleh Indonesia, seperti gejolak politik dan ekonomi yang carut marut serta gejolak keamanan yang tak menentu. Dalam lingkup internasional, adanya pertentangan antara Blok Timur (Uni Sovyet) dan Blok Barat (Amerika Serikat) atau yang lebih dikenal dengan Perang Dingin.

Situasi dan kondisi tersebut membawa pengaruh bagi dinamika politik luar negeri Indonesia pada waktu itu. Peristiwa didalam negeri seperti perjuangan Indonesia melawan Belanda, pemberontakan G 30 S/ PKI, masalah Irian Barat juga membuat mempengaruhi arah perkembangan politik luar negeri Indonesia Begitu pun juga pada era kepemimpinan Soeharto, yang dihadapkan pada kondisi politik dan ekonomi yang masih sangat labil, yang ditandai dengan banyaknya pengangguran dan tingginya tingkat inflasi juga turut serta mempengaruhi arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini akan berupaya mendeskripsikan, menjelaskan serta membandingkan fenomena politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dari masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebagai suatu evaluasi

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Perang dunia ke II tidak saja menghasilkan bipolaritas dalam sistem internasional tetapi juga membawa perubahan yang signifikan terhadap proses dekolonisasi, sebagai akibatnya semangat kebangsaan secara merata meluap-luap dan meledak dalam bentuk perjuangan kemerdekaan terhadap penjajahan. Tak terkecuali, puncak keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan memproklamkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Dengan proklamasi tersebut maka muncullah Indonesia sebagai negara yang merdeka di peta dunia, sejak saat itulah para *founding father* mulai menyadari bahwa eksistensi Indonesia pada waktu itu, sekarang dan masa yang akan datang tidak mungkin dapat hidup sendiri, oleh karena itu sudah sebuah keharusan menjalin interaksi dengan negara lain guna mencapai kepentingan-kepentingan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan suatu ikatan persatuan dan kesatuan segenap rakyat Indonesia serta intensifikasi hubungan dengan negara-negara lain demi mewujudkan kepentingan bersama.

Politik luar negeri Indonesia tidak hanya mengabdikan dan mewujudkan kepentingan nasional akan tetapi juga memiliki makna keluar, sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah anti kolonialisme dan anti imperialisme. Sedangkan alinea keempat mengharuskan Indonesia berperan aktif dalam kancah internasional dalam upaya mencapai ketertiban dunia yang berdasarkan

cerminkan keseimbangan dan keserasian politik luar negeri Indonesia bukan hanya perjuangan kepentingan nasional tetapi juga kepentingan global.

Bagi Indonesia yang menganut sistem politik luar negeri bebas dan aktif tentunya memerlukan adaptasi dalam menggariskan kebijaksananya agar eksistensi politik luar negeri Indonesia selalu dinamis, aktif dan responsif terhadap tuntutan kepentingan nasional. Sebagaimana suatu politik luar negeri negara lainnya, politik luar negeri Indonesia dapat dipahami dengan memperhatikan kondisi aktual dalam negeri khususnya yang berkaitan dengan proses politik domestik dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi pelaku eksternalnya.

Penekanan pada kondisi aktual dalam negara yang mencakup sumber daya dan berdasarkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam menggunakannya sebagai *bargaining position* dalam percaturan politik dunia dalam menggapai kepentingan nasional.

Dinamika pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selalu berubah dan kontinyu mengikuti arus kondisi aktual yang terjadi di dalam negeri maupun di lingkungan internasional. Kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan masih bergerak dalam tataran perjuangan dalam mempertahankan cita-cita proklamasi dari genggaman kolonialisme Belanda. Pergolakan politik perjuangan masih menjadi suatu prioritas kebijakan pemerintah Indonesia pada kala itu. Kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan masih sangat darurat dikarenakan masih terfokusnya dalam perjuangan melawan Belanda di meja perundingan dimana yang menjadi persoalan adalah bagaimana meraih kemerdekaan nyata yang telah diproklamasikan

110 | *Journal of International Law and Politics* | Volume 1, No. 1, 2014

yang akan dilakukan terhadap Belanda yang ingin kembali ke bekas kolonialnya. Untuk itu, dalam masa tahun 1945-1950, Indonesia menghadapi perundingan-perundingan dengan Belanda untuk mewujudkan tegaknya NKRI. Pada itu pula, Indonesia juga menghadapi agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda.

Pada itu pula, Indonesia juga dihadapkan pada pembontakan lokal, seperti pembontakan yang didalangi oleh PKI/Musuh dan juga pemerintah harus meredam gejolak konflik lokal seperti separatis Gerakan Darul Islam, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, pembontakan Andi Aziz, Gerakan Separatis Maluku Selatan dan Gerakan Pemerintahan revolusioner.

Perwujudan cita-cita proklamasi Indonesia pada saat itu, puncaknya pada tuntutan moral yang dinyatakan dalam pemerataan keadilan yang selama ini tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dan disamping itu juga, sebagai tujuan nasional Indonesia yang belum terwujud mengenai Irian Barat. Oleh karena itu, Irian Barat dipandang sebagai simbol pundamental manivestasi nasionalisme maka Soekarno menggalang kebijakan konfrontasi perebutan Irian Barat.

Berdasar pada situasi kondisi politik Indonesia saat itu, otomatis berimbas pada terpinggirnya pembangunan ekonomi Indonesia dikarenakan pengeluaran pemerintah yan membengkak sejak tahun 1958. Pemerintah orde lama menjalankan pengeluaran defisit besar-besaran, hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah untuk aksi militer pada bulan desember 1961, pemerintah meluncurkan kampanye untuk merebut Irian Barat. Hal ini dilanjutkan dengan konfrontasi dengan malaysia pada

Dalam kebijakan penghematan pengeluaran, maka pemerintah Indonesia mencanangkan program berdikari dengan swasembada beras dan nasionalisasi perusahaan asing tahun 1957. nasionalisasi perusahaan asing tersebut, tidak hanya menghancurkan posisi negara sebagai tempat investasi tetapi juga memperburuk hubungan dengan negara Blok Barat. Untuk itu pemerintah Soekarno memanfaatkan situasi sistem internasional bipolar atau yang lebih dikenal dengan perang dingin. Dalam sistem internasional tersebut pemerintah Soekarno lebih berorientasi dalam kerjasama dengan blok timur guna mendapatkan bantuan untuk menutup defisit anggaran.

Dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin, dan dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), mulailah Jendral Soeharto naik tahta dan berkuasa. Ketika pemerintahan Soeharto memulai pekerjaannya pada tahun 1966, perekonomian Indonesia dalam keadaan ambruk total dengan inflasi lebih dari 650% sehingga rakyat menderita, untuk itu pada tahap awal tersebut merupakan masa stabilisasi dan rehabilitasi dan setelah April 1969 barulah muncul Rapelita I (Rencana Lima Tahun) tahun 1969/1970 sampai 1973/1974, Rapelita II, (tahun 1974/1975 sampai 1978/1979), Rapelita III (tahun 1979/1980 sampai 1983/1984), Rapelita IV (tahun 1984/1985 sampai 1989/1990), Rapelita V (tahun

Dengan berdasarkan ketetapan MPRS NO XXIII/1966, yang merinci tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Ketetapan MPRS tersebut merinci 3 tahap program ekonomi, yaitu :

1. Tahap penyelamatan.
2. Tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.
3. dan tahap pembangunan ekonomi.

Sebagaimana tujuan Soeharto, untuk melaksanakan pembangunan ekonomi maka harus diciptakan kondisi dan situasi domestik maupun regional yang stabil dan kondusif. Untuk itu dengan kabinet Ampera Indonesia mengambil langkah untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, masuk dan aktifnya kembali Indonesia dalam keanggotaan PBB, berpartisipasi dalam pembentukan Asean, serta dibuatnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA). Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara Asia Tenggara termasuk Indonesia mendeklarasikan kerja sama dan ikatan sesuai dengan timbal balik antar bangsa seregion, yaitu Asean. Pendeklarasian ini merupakan upaya Soeharto untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan guna melaksanakan kerja sama ekonomi demi pembangunan stabilitas perekonomian Indonesia.

Untuk mengembalikan kepercayaan luar negeri, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dan pembicaraan secara resmi maupun tidak resmi baik dalam forum bilateral ataupun multilateral mengenai kebijaksanaan dan niat baik pemerintah Indonesia dengan kabinet Amperanya untuk melakukan penjelajahan dalam upaya pencarian peminjaman atau hutang luar negeri serta guna

... ..

asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. Khusus dalam tahap rehabilitasi dan stabilisasi ini, Indonesia membutuhkan kredit darurat guna membangkitkan perekonomian Indonesia. Sebagai realisasi dari kebijakan tersebut, atas prakarsa pemerintah Jepang pada bulan September 1966 diadakan pertemuan multilateral yang pertama di Tokyo, yang dikenal dengan sebutan Tokyo Club. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara kreditor diluar Blok Komunis, yang bertujuan membicarakan masalah ekonomi dan keuangan Indonesia, terutama masalah penundaan hutang Indonesia pada Orde Lama.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menemukan permasalahan, yaitu "Bagaimana pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Presiden Soekarno dan Soeharto (tahun 1945 sampai 1998)?"

E. Kerangka Teori

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.¹ Pembahasan mengenai politik luar negeri tidak bisa dilepaskan dari kondisi aktual domestik yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan politik luar negeri yang mana berisikan kepentingan nasional.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri merupakan :

¹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *International Politics*, McGraw-Hill International Book

” Suatu strategi atau rangkaian yang terencana yang dibuat oleh pembuat keputusan suatu negara vis a vis negara lain atau kesatuan internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan nasionalnya”.²

Dari definisi yang dikemukakan oleh Jack Plano dan Olton terlihat ada beberapa unsur utama dalam politik luar negeri, unsur-unsur tersebut adalah strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan kepentingan nasional suatu negara.

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya, strategi dasar yang harus dicapai diluar batas wilayahnya dan itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang akan dibuat dalam kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa. Bagi para aktor pengambil keputusan dan kebijaksanaan luar negeri suatu bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap formulasi kebijaksanaan politik luar negerinya.

Sebagaimana yang di utarakan oleh Clymer Rodee dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul *“The Introduction to Political Science“* menyatakan bahwasanya “Politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan dengan negara-negara lain. Dia berhubungan dengan proses pembuatan keputusan mengikuti pilihan jalan tertentu. Ini artinya keputusan bagi kebijakan politik luar negeri berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional yang hendak dicapai.

Sehingga pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa di mulai dari kepentingan nasional negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan

politik luar negeri juga didasarkan pada konsep kepentingan nasional. Konsep ini menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Hans J. Morgenthau menyatakan esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasionalnya.³ Bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki sejumlah kebutuhan dan tujuan yang sebagian besar dapat diperoleh melalui pengadaaan hubungan serta penyebaran pengaruh terhadap negara lain. Hubungan luar negeri tersebut di tujukan untuk memecahkan berbagai persoalan baik yang berhubungan dengan masalah luar negeri maupun luar negeri.

Untuk memahami mekanisme politik luar negeri maka haruslah memerlukan sebuah teori sebagai jembatan analisis. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan pada kita mengapa sesuatu itu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi. Dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga juga menjadi dasar bagi prediksi.⁴

Dari pengertian ini secara gamblang teori bisa diartikan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu terjadi dan yang akan terjadi, lebih jelas lagi Koentjaraningrat menyatakan bahwa secara umum teori bisa diartikan sebagai pernyataan tentang hubungan sebab akibat dari gejala-gejala yang di teliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu yang terdapat dalam suatu obyek tertentu.

Dasar teori yang digunakan adalah Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) dari William D. Coplin. Menurut William D. Coplin :

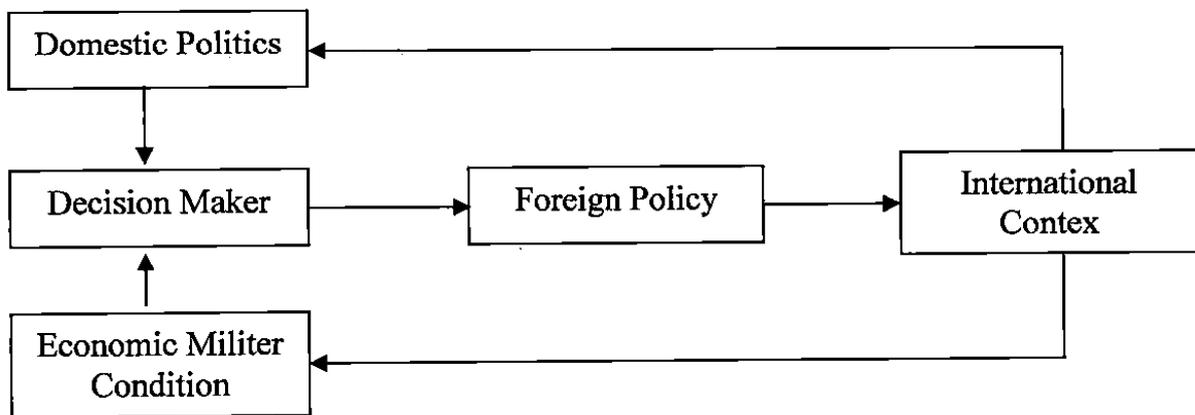
”Apabila kita akan menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para

³ . Djumadi M. Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, Fakultas Isipol, HI UMY, 1999, hal 15.

pemimpin negara (pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan atau konsiderasi. Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer bnegara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. Ketiga, kontek internasional”.⁵

Untuk lebih memahaminya dapat dilihat bagan dibawah ini yang akan menjelaskan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri.

**Proses Pengambilan Keputusan
(Menurut William D. Coplin)**



Sumber : *William D.Coplin (Terjemahan M. Marbun)*, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis. Sumber Baru, Jakarta. 1982, hal 30.

Berdasarkan bagan teori diatas, dapat diketahui bahwa pembuatan kebijakan

Kondisi politik era Soekarno masih sangat darurat dikarenakan masih adanya gejolak-gejolak konflik di daerah-daerah dan juga perjuangan Indonesia melawan Belanda di meja perundingan. Begitu juga di era Soeharto yang masih mewarisi instabilitas politik yang terjadi di era Soekarno. Pada tahun 1967, Indonesia juga masih mengalami konflik, seperti masalah Timor-Timur dan Irian Barat yang merupakan sebagai bentuk dari ketidak kondusifan situasi dan kondisi politik Indonesia pada waktu itu.

2. Kondisi ekonomi dan militer.

Pasca kemerdekaan, perekonomian Indonesia masihlah sangat terpuruk ditandai dengan dengan banyaknya pengangguran dan tingkat inflasi yang tinggi sehingga membuat negara Indonesia dilanda krisis cukup berat. Pasca lengsernya Soekarno dari kursi kepresidenan di gantikan oleh Soeharto, kondisi ekonomi Indonesia masih dalam posisi labil akan tetapi Soeharto mulai merencanakan pembangunan ekonomi besar-besaran, seperti membuka pintu masuk bagi investor asing serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dunia untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Pada era Soeharto, militer terutama TNI AD mendapatkan tempat empuk dalam pemerintahan karena dianggap mampu oleh Soeharto untuk menjamin stabilitas politik.

3. Konteks Internasional

Konteks internasional berdasarkan kondisi global yang berlaku pada saat itu. Sebagaimana keadaan politik dunia yang mengalami pergeseran ke sistem

dalam mempertimbangkan pembbuatan kebijakan politik luar negeri agar dapat mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu rencana strategi politik luar negeri Indonesia haruslah mempertimbangkan perkembangan kondisi politik internasional.

Konsepsi Kekuasaan Masyarakat Jawa

Menurut Anderson⁶, ada empat hal yang menjadi dasar pemikiran kekuasaan dalam perspektif kebudayaan Jawa. Keempat hal tersebut merupakan hasil abstraksi Anderson dengan melihat dan mempelajari literatur-literatur Jawa kuno dalam sejarah kerajaan Jawa. Keempat hal pokok tersebut antara lain :

a. Kekuasaan itu konkret.

Bagi masyarakat Jawa, kekuasaan itu ada terlepas dari orang yang mungkin mempergunakannya. Kekuasaan bukanlah suatu anggapan teoritis saja melainkan sesuatu realitas yang benar-benar ada. Kekuasaan diartikan sebagai daya yang tidak bisa diraba, penuh misteri dan bersifat ketuhanan yang menghidupkan alam semesta. Kekuasaan terwujud dalam setiap aspek kehidupan dunia alami. Tetapi semua itu dinyatakan secara murni dalam misteri pokok kehidupan, yaitu proses generasi dan regenerasi. Dalam pemikiran tradisional Jawa, tidak ada garis batas yang tegas antara zat organis dan organis, ini karena segala sesuatunya ditopang oleh kekuasaan yang tidak terlihat. Konsepsi yang menyatakan bahwa seluruh kosmos ini dipenuhi oleh suatu daya tarik yang tidak terbentuk tetapi selalu kreatif.

⁶. R. O. G. Anderson, "The Idea of Power In Javanese Culture" dalam Claire Holt (ed) *Culture and*

b. Kekuasaan itu homogen.

Dari konsepsi ini timbul pendapat bahwa semua kekuasaan itu sama jenisnya dan sama pula sumbernya. Kekuasaan ditangan satu individu atau satu kelompok adalah identik dengan kekuasaan yang ada ditangan individu atau kelompok lain manapun. Ini bisa dipandang menciptakan suatu pemerintahan yang otoriter.

c. Jumlah kekuasaan dialam semesta tetap.

Menurut pandangan orang Jawa, alam semesta tidak bertambah dan juga tidak berkurang atau menyempit. Demikian pula jumlah kekuasaan yang terdapat didalamnya selalu tetap. Dikarenakan kekuasaan ada begitu saja dan bukan merupakan hasil dari organisasi, kekayaan, persenjataan dan lain-lain, malah lebih dulu adanya dari pada lainnya dan membuat semuanya seperti adanya, maka jumlah keseluruhannya tidak berubah walaupun pembagian kekuasaan dalam alam semesta mungkin dapat berubah. Untuk teori politik, pendapat ini mempunyai akibat penting yaitu terpusatnya kekuasaan di satu pihak atau pada satu orang mengharuskan pengurangan jumlah kekuasaan ditempat lain dalam jumlah yang sebanding.

d. Kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan

Karena semua kekuasaan berasal dari sumber tunggal yang homogen maka kekuasaan itu sendiri lebih dahulu ada dari pada masalah-masalah baik dan

1. Menurut para pemikir orang Jawa, menuntut hak berkuasa berdasarkan

sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda tidak akan ada artinya⁷. Bagi orang Jawa, hal semacam itu tidak relevan untuk dipertanyakan. Sebab masalah kekuasaan absah dan bukan tidak abash itu tidak penting, karena yang terpenting kekuasaan itu ada. Dengan demikian orang Jawa memandang kekuasaan sebagai Sesuatu hal yang konkret, homogen, tetap jumlah keseluruhannya dan sebagai kekuasaan maka tidak mempunyai implikasi moral yang inheren.

Disamping empat dasar pemikiran pokok konsep kekuasaan, terdapat suatu hal pokok lainnya, bahwa kekuasaan bersifat *numinus*, yakni sesuatu yang bersifat “Illahiah” atau “adikodrati”. Sifat ini sejalan dalam konsep Jawa tentang lingkungan atau hidup yang mana harus dihayati sebagai refleksi dari kekuasaan adikodrati.⁸Gabungan dari berbagai elemen pandangan ini melahirkan suatu implikasi praktek kekuasaan yaitu konsentrasi kekuasaan atau pemusatan kekuasaan. Disebabkan latar belakang konsepsi lingkungan dan dunia yang menyatu dengan kekuatan adikodrati untuk mencapai keteraturan. Keteraturan dan harmonis merupakan obsesi masyarakat Jawa. Obsesi inilah yang kemudian melahirkan suatu gejala kekuasaan yang dianggap homogen dan tak terbagi. Oeh karena itu, apabila terjadi pemencaran kekuasaan pasti akan menimbulkan ketidakteraturan ataupun berbagai konflik lainnya. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat Jawa lebih banyak memahami atau membicarakan masalah bagaimana memusatkan dan mempertahankan kekuasaan dari pada masalah bagaimana menggunakannya dengan wajar.

⁷. Misalnya, menyatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari sumber kekayaan adalah sah, sementara kekuasaan berdasarkan persenjataan tidak sah.

Kesatuan ini harus diakui oleh semua dengan membawa diri sesuai dengan tuntutan tata karma sosial. Mereka yang berkedudukan tinggi harus diberi hormat. Sedangkan sikap yang lebih tepat bagi orang yang kedudukannya lebih rendah adalah sikap tanggung jawab dan melayani, jika semua orang menerima kehadirannya tersebut maka tatanan sosial akan lebih terjamin. Untuk itu, orang jangan mengembangkan ambisi, jangan mau bersaing satu sama lain melainkan hendaknya, setiap orang puas dengan kedudukannya yang telah diperolehnya dan berusaha menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Karena dengan ambisi tersebut dianggap akan menyebabkan persaingan serta keinginan untuk berkuasa, kesemuannya itu akan berakibat sebagai sumber keterpecahan, ketidakselarasan dan kontradiksi yang seharusnya dicegah dan ditindas.

Dalam hal pemusatan kekuasaan, dizaman kerajaan dulu dilakukan dengan jalan melakukan perayaan besar-besaran di istana raja. Perayaan-perayaan tersebut bersifat memanggil, seperti malam *Satu Suro*, yang memamerkan benda-benda pusaka kraton yang dianggap mengandung kekuatan.⁹ Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa tradisi pemikiran politik, Jawa secara khusus memberi tekanan pada pratanda-pratanda pemusatan kekuasaan. Dengan cara yang konsisten, pratanda yang paling jelas dari pemegang kekuasaan, yaitu kemampuannya berkonsentrasi, dalam hal ini mengenai pemusatan kekuasaan diri sendiri, meyerap kekuasaan luar¹⁰ dan memusatkan dalam dirinya hal-hal yang kelihatannya bertentangan.

⁹ . Dalam Indonesia modern ritual seperti ini dilakukan dengan cara parade militer dengan swegala macam perlengkapan perangnya, hal ini guna menunjukkan kekuatan dan kegagahan dan kekuatan yang dimiliki oleh penguasa.

¹⁰ Penyerapan kekuasaan sering dijadikan tema dalam lakon pewayangan dalam tradisi sejarah. Salah satu lakon yang khas yang menghubungkan jenis penyerapan ini dengan menyatukan dua prinsip yang

Kekuasaan disini diartikan sebagai kemampuan memberikan kehidupan tapi juga kemampuan mempertahankan kekuatan yang lancar dan layaknya bertindak seperti magnet yang menghimpun bubuk besi yang berserakan menjadi terpola. Untuk itu dalam hal ini, masyarakat Jawa percaya bahwa jika penguasa masih memiliki kekuasaan maka kekacauan tidak akan pernah terjadi dan sebaliknya jika kekacauan terjadi maka itu merupakan pratanda bahwa kekuasaan dalam negara telah menjadi kendor dan terpecah.

setelah musuh dikalahkan, dalam kematiannya, ia memasuki tubuh sang ksatria. Dan dengan begitu,

F. Hipotesis

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Presiden Soekarno maupun Soeharto banyak mengalami perubahan baik gaya kepemimpinan politik maupun orientasinya dalam mengambil kebijakan luar negeri, yaitu :

1. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Soekarno telah terjadi pergeseran kebijakan yang mana tampak lebih menjalin erat hubungannya dengan negara-negara Blok Timur.
2. Sedangkan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era presiden Soeharto kebijakan politik luar negeri lebih ditujukan dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara Barat (Amerika Serikat).

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian perihal politik luar negeri Indonesia ini diteliti khususnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto dari tahun 1945 sampai 1998.

H. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data guna membantu penelitian mengenai permasalahan politik luar negeri Indonesia dilakukan melalui studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan dijadikan sebagai sumber seperti, buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, dan

I. Sistematika penulisan

Bab 1 : Berisikan mengenai penjelasan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisikan penjelasan mengenai politik luar negeri Indonesia di era Presiden Soekarno (1945-1967) dan Soeharto (1967-1998)

Bab III : Berisikan penjelasan mengenai perekonomian Indonesia pada era Presiden Soekarno dan Soeharto.

Bab IV : Berisikan penjelasan tentang pertahanan dan keamanan Indonesia di